

**PERAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
(BPODT) DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA
DESTINASI WISATA THE KALDERA TOBA
NOMADIC ESCAPE DI DESA
PARDAMEAN SIBISA**

SKRIPSI

OLEH:

INDAH SUCITA SIRAIT

228520037



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**PERAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
(BPODT) DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA
DESTINASI WISATA THE KALDERA TOBA
NOMADIC ESCAPE DI DESA
PARDAMEAN SIBISA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik**

Universitas Medan Area

Oleh:

INDAH SUCITA SIRAIT

228520037

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dalam Pemberdayaan UMKM Pada Destinasi Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa

Nama : Indah Sucita Sirait

NPM : 228520037

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Chairika Nasution, S.AP, M.AP

Mengetahui

Dekan



Dr. Chairika Nasution, S.AP, M.AP



Dr. Drs. Mulya Muda, M.AP

Tanggal Lulus: 9 Maret 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan plagianisme dalam skripsi ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Medan, 9 Maret 2026

Indah Sucita Sirait

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Sucita Sirait
NPM : 228520037
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PERANAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA (BPODT) DALAM MENGELOLA DESTINASI WISATA THE KALDERA NOMADIC ESCAPE DI DESA PARDAMEAN SIBISA" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 9 Maret 2026

Yang Menyatakan



Indah Sucita Sirait

ABSTRAK

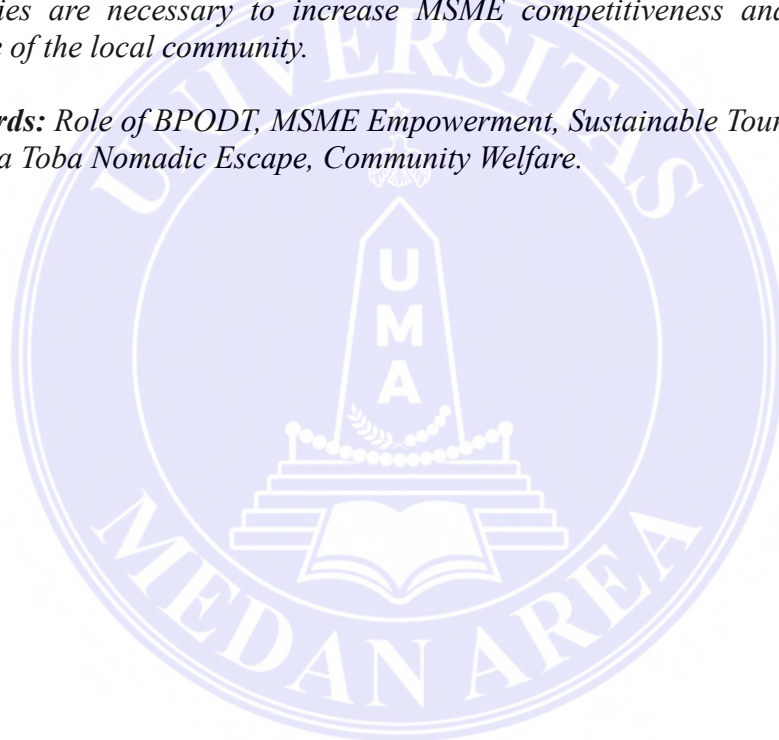
Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pemberdayaan UMKM di kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Desa Pardamean Sibisa, meskipun kawasan ini telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas. Pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya inovasi produk, serta akses pemasaran yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam pemberdayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPODT berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana prasarana, sebagai regulator melalui pengaturan aktivitas ekonomi, dan sebagai dinamisator melalui pelatihan dan pendampingan. Namun, peran tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan berkelanjutan, inovasi produk, serta strategi promosi yang lebih efektif agar UMKM mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Peran BPODT, Pemberdayaan UMKM, Pariwisata Berkelanjutan, The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

The problem addressed in this study is the suboptimal empowerment of MSMEs in The Kaldera Toba Nomadic Escape tourist area, Pardamean Sibisa Village, despite its designation as a priority tourism destination. MSME actors still face limitations in human resources, low product innovation, and limited market access. This study aims to analyze the role of the Lake Toba Authority Executive Agency (BPODT) in empowering MSMEs. The research uses a qualitative method with a descriptive approach, employing interviews, observations, and documentation for data collection. The findings indicate that BPODT acts as a facilitator by providing infrastructure, as a regulator through managing economic activities, and as a dynamizer by conducting training and assistance programs. However, these roles have not been fully optimized due to several constraints. Therefore, strengthening continuous guidance, improving product innovation, and enhancing promotional strategies are necessary to increase MSME competitiveness and improve the welfare of the local community.

Keywords: *Role of BPODT, MSME Empowerment, Sustainable Tourism, The Kaldera Toba Nomadic Escape, Community Welfare.*



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pardamean Sibisa, Lumban Gambiri pada tanggal 24 Februari 2004 dari Ayah Tomuan Sirait dan Ibu Remina Gultom. Penulis merupakan putri pertama dari 4 bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 174562 Sibisa pada tahun 2010-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Satu Atap Sibisa pada tahun 2016-2019. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Saposurung, Balige pada tahun 2019-2022. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Medan Area Program Studi Administrasi Publik pada tahun 2022-2026.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dan proses perkuliahan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul **“Peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam Pemberdayaan UMKM pada Destinasi Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Strata Satu (S1) jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Medan Area serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
2. Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam proses akademik penulis selama perkuliahan.
3. Ibu Dr. Chairika Nasution S.AP, M.AP selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang membangun kepada penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Drs. Indra Muda Hutasuht, M.AP selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan serta kemudahan dalam proses akademik penulis.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan, sehingga menjadi bekal dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhingga. Dalam setiap langkah penulis, ada harapan dan cinta mereka yang selalu menyertai, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketiga adik laki-laki penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta keceriaan yang menjadi penghibur di tengah kesibukan dan tekanan selama penyusunan skripsi, sehingga penulis tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Hendra Clinton Simanjuntak, yang telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran yang tidak pernah habis, perhatian yang tulus, serta dukungan yang selalu hadir di setiap keadaan. Dukungan yang diberikan bukan hanya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
9. Seluruh saudara Kos 174 B, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas bantuan, perhatian, serta momen kebersamaan yang turut memberikan energi positif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Grup *Five Alive* yang terdiri dari penulis sendiri, Monica, Betaria, Yenni, dan Zyanetta, yang selalu saling mendukung, menguatkan, berbagi cerita, dan menjadi tempat bertukar semangat dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan, motivasi, serta kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam menyusun skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik, maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Medan, 9 Maret 2026

Indah Sucita Sirait

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Peran.....	11
2.1.1 Pengertian Peran	11
2.1.2 Indikator Peran.....	13
2.2 Pemberdayaan	15

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan.....	15
2.2.2 Tahapan Pemberdayaan	17
2.2.3 Indikator Pemberdayaan	19
2.2.4 Tujuan Pemberdayaan.....	20
2.2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	21
2.2.6 Peran UMKM di Indonesia.....	22
2.3 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT)	24
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum BPODT	24
2.4 Penelitian Terdahulu	25
2.5 Kerangka Berpikir	31
III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian	33
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2.2 Jadwal Penelitian	35
3.3 Informan Penelitian	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	40
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil.....	42
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.2 Geografis.....	42
4.1.3 Visi Misi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT)	43

4.1.4 Struktur Organisasi Beserta Tugas BPODT.....	44
4.1.5 Hasil Wawancara	47
4.2 Pembahasan Penelitian	59
4.2.1 Peran BPODT dalam Pemberdayaan UMKM Pada Destinasi Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa	59
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat BPODT dalam Pemberdayaan UMKM di Destinasi Wisata <i>The Kaldera Toba Nomadic Escape</i>	84
V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	23
2. Jadwal Penelitian.....	33
3. Informan Penelitian.....	35
4. Jenis UMKM Di Kawasan Wisata <i>The Kaldera Nomadic Escape</i>	59



DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Alur Kerangka Berpikir.....	30
2. Kawasan Wisata <i>The Kaldera Toba Nomadic Escape</i>	41
3. Gambar Map Lokasi Penelitian.....	42
4. Struktur Organisasi BPODT	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor pariwisata berada dalam kerangka kebijakan pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan dalam menetapkan arah pembangunan nasional, termasuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui kementerian teknis, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki visi untuk menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Dalam misinya, Kemenparekraf menekankan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, termasuk UMKM.

Menurut Yoeti (2008:35), sektor pariwisata mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karena menyediakan berbagai peluang usaha dan memperluas lapangan kerja. Di era globalisasi, pengembangan pariwisata tidak hanya difokuskan pada daya tarik destinasi semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan konsep pariwisata

berkelanjutan menurut UNWTO (2015) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kehadiran sektor pariwisata dapat memberikan dampak ganda (multiplier effect), salah satunya melalui tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks pembangunan nasional, sektor pariwisata berada dalam kerangka kebijakan pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan dalam menetapkan arah pembangunan nasional, termasuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui kementerian teknis, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki visi untuk menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Dalam misinya, Kemenparekraf menekankan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, termasuk UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kawasan prioritas, salah satunya Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Penetapan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba,

yang menjadi dasar pembentukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). BPODT dibentuk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoordinasikan kawasan pariwisata secara terpadu dan terintegrasi.

Pembentukan BPODT dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan percepatan pembangunan pariwisata yang efektif, mengingat kompleksitas pengelolaan kawasan Danau Toba yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, BPODT berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM di sekitar kawasan wisata.

Pemberdayaan UMKM dalam konteks pariwisata berkelanjutan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta tujuan nomor 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan. Dengan kata lain, mengoptimalkan pemberdayaan UMKM di Desa Pardamean Sibisa bukan hanya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan global. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa penelitian mengenai peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga nilai praktis dan strategis.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara kebijakan Presiden, peran Kemenparekraf, pembentukan BPODT, dan pemberdayaan UMKM. Presiden menetapkan arah kebijakan, Kemenparekraf merumuskan strategi dan program,

BPODT mengimplementasikan di tingkat kawasan, dan UMKM menjadi aktor utama yang merasakan dampak langsung dari pengembangan pariwisata tersebut.

Salah satu kawasan pariwisata prioritas nasional yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah *The Kaldera Toba Nomadic Escape* yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kawasan ini merupakan bagian dari *Toba Caldera UNESCO Global Geopark*, dan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. BPODT memiliki mandat untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba secara terpadu.

Dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan, BPODT juga berperan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan wisata, termasuk pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat, daerah, dan badan otorita untuk mendorong tumbuhnya UMKM di sektor pariwisata.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BPODT juga diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan penguatan ekonomi kreatif berbasis UMKM dalam setiap pengelolaan kawasan pariwisata. Dalam hal ini, BPODT memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengembangkan infrastruktur

dan promosi destinasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan daya saing ekonomi masyarakat setempat.

Potensi besar pengembangan kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape* belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Pardamean Sibisa. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang peneliti lakukan, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, seperti jumlah pengunjung yang tidak merata, berdasarkan Laporan Kunjungan Wisata BPODT (2023–2024), jumlah pengunjung menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan rata-rata kunjungan 500–1.200 orang per bulan, namun tidak merata setiap minggu. Pada hari libur dan *event* besar, kunjungan meningkat hingga 2–3 kali lipat, sedangkan pada hari biasa sangat menurun.

Berdasarkan observasi lapangan, terdapat sekitar 10 unit kios UMKM di area *The Kaldera Toba* yang mayoritas ($\pm 70\%$) masih berbentuk bangunan semi permanen dan belum memiliki fasilitas memadai seperti listrik stabil, area *display* produk, sarana duduk yang nyaman, serta keterbatasan modal untuk memperbaiki sarana usaha dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, pelaku UMKM belum memiliki fleksibilitas penuh dalam melakukan perubahan fisik terhadap kios karena seluruh penataan kawasan harus memperoleh persetujuan BPODT.

Kapasitas sumber daya manusia UMKM juga masih terbatas, mengacu pada Laporan Pendampingan UMKM oleh Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Toba Tahun 2023, tercatat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di wilayah penyangga destinasi wisata Danau Toba belum pernah mengikuti pelatihan mengenai manajemen usaha pariwisata, pengolahan kuliner berbasis standar wisata, pencatatan keuangan, maupun pemasaran digital. Temuan ini selaras dengan pra-

penelitian peneliti di lapangan yang menemukan bahwa UMKM setempat masih kesulitan menyesuaikan produk dengan preferensi wisatawan modern. Dari aspek pemasaran, promosi produk UMKM juga masih bersifat tradisional. Mayoritas pelaku UMKM belum memanfaatkan media sosial dan *marketplace* secara optimal sehingga jangkauan pemasaran tetap terbatas, padahal digital *marketing* telah menjadi kebutuhan dasar bagi UMKM di sektor pariwisata.

Jenis UMKM yang beroperasi di Desa Pardamean Sibisa dan kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape* cukup beragam seperti UMKM kuliner mulai dari penjual makanan tradisional Batak seperti naniura, arsik, dan mie gomak, hingga warung makanan sederhana serta UMKM minuman dan *snack* lokal seperti kopi robusta dan pisang goreng. Selain itu, terdapat UMKM kerajinan tangan yang memproduksi ulos, aksesoris kayu, dan tas *handmade*. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 10 UMKM aktif yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas pariwisata di kawasan The Kaldera, sehingga keberlanjutan dan perkembangan sektor ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Dilihat juga dari penelitian yang dilakukan oleh Mutia Aisyah Putri (2023), hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah di berbagai wilayah masih menghadapi persoalan serupa, seperti pendampingan yang belum tepat sasaran, pelatihan yang belum menjawab kebutuhan pelaku usaha, dan kurangnya dukungan manajerial bagi UMKM. Mutia menemukan bahwa program pemberdayaan cenderung bersifat formalitas dan belum mampu meningkatkan kapasitas UMKM secara signifikan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dengan kondisi riil pelaku

usaha di lapangan. Temuan ini sejalan dengan fenomena yang terlihat pada pra-penelitian di Desa Pardamean Sibisa, di mana pelaku UMKM belum sepenuhnya memperoleh pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, penelitian tersebut hanya menyoroti peran pemerintah daerah secara umum dan tidak mengkaji lembaga otorita pariwisata yang memiliki kewenangan berbeda.

Terdapat kesenjangan penelitian yang jelas, penelitian terdahulu belum mengkaji secara spesifik bagaimana lembaga otorita seperti Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menjalankan perannya dalam pemberdayaan UMKM di kawasan wisata strategis yang berada langsung di bawah pengelolaannya. Belum ada penelitian yang menelaah peran BPODT sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator dalam konteks pemberdayaan UMKM di *The Toba Kaldera Nomadic Escape*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana BPODT menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam meningkatkan kapasitas UMKM lokal.

Fenomena yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun destinasi wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* telah berkembang dan ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas super (*Super Priority Tourism Destination*) oleh pemerintah pusat, kontribusi UMKM lokal di kawasan tersebut masih belum optimal. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar pelaku UMKM masih beroperasi dalam skala kecil dan tradisional, menghadapi keterbatasan modal, rendahnya keterampilan manajerial, serta minimnya inovasi produk. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi besar destinasi wisata dengan

realitas pemberdayaan UMKM lokal, yang menuntut adanya evaluasi, pendampingan, dan strategi pemberdayaan yang lebih terarah dari BPODT agar pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Atas uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih jauh, yang tertuang dalam skripsi berjudul “Peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Destinasi Wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM pada destinasi wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi BPODT dalam pemberdayaan UMKM di Desa Pardamean Sibisa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM pada destinasi wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat BPODT dalam pemberdayaan UMKM pada destinasi wisata tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini ialah kontribusi manfaat yang diharapkan diperoleh baik dari Teoritis maupun Praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait peran lembaga otorita pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat. Selama ini, kajian lebih banyak berfokus pada pemerintah pusat dan daerah, sementara peran lembaga seperti BPODT yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan kawasan pariwisata masih jarang diteliti. Melalui penelitian tentang peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM di *The Kaldera Toba Nomadic Escape*, studi ini berupaya memperkaya literatur mengenai tata kelola kolaboratif dan pembangunan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini juga mengintegrasikan teori peran lembaga dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM agar menghasilkan landasan konseptual yang lebih komprehensif untuk kajian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi BPODT, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran BPODT dalam mendorong pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan potensi lokal.

- a) Bagi Pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dukungan, peluang, serta hambatan yang ada, sehingga dapat mendorong pelaku UMKM lebih aktif berkolaborasi dengan BPODT.
- b) Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Pariwisata, Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kolaborasi dengan BPODT dan pihak terkait dalam mendukung pemberdayaan pelaku UMKM, baik dari aspek pelatihan, pengelolaan, maupun pemasaran produk lokal.
- c) Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai peran BPODT, pemberdayaan UMKM, maupun pengelolaan pariwisata berkelanjutan di daerah lain.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pariwisata dan pemberdayaan UMKM di kawasan destinasi super prioritas. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sebagai lembaga otorita dalam pengelolaan kawasan wisata, serta memberikan model analisis yang dapat digunakan untuk memahami efektivitas pemberdayaan UMKM pada konteks pariwisata berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Veitzal Rivai (2004:63) mendefinisikan peranan sebagai perilaku individu yang mapan dan diantisipasi dalam posisi tertentu. Menurut Soerjono Soekanto (2012:212), konsep peran meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau status sosial individu. Dalam konteks ini, peran dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengarahkan keterlibatan individu dalam kehidupan di masyarakat.
2. Peran mewakili kapasitas individu untuk berkontribusi pada fungsi masyarakat sebagai bagian dari entitas yang terorganisir.

3. Peran dapat dianggap sebagai kontribusi signifikan individu terhadap tatanan sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2003:65) dalam Rumlus dkk (2013:3), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Peran merupakan tanggung jawab yang melekat pada seseorang atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, peran mencerminkan tindakan dan tanggung jawab yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pihak yang memiliki wewenang. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sebagai lembaga otoritatif yang dibentuk pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan kawasan pariwisata di sekitar Danau Toba, termasuk destinasi wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa. Sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pariwisata, BPODT diharapkan mampu menciptakan inovasi dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku, tugas, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau status sosial yang dimilikinya dalam masyarakat atau organisasi. Peran mencakup norma, aturan, dan tanggung jawab yang harus dijalankan, serta menjadi bentuk kontribusi individu maupun kelompok terhadap tatanan sosial. Dengan kata lain, peran merupakan aspek dinamis dari status yang

mengarahkan bagaimana seseorang bertindak, berfungsi, dan memberi pengaruh dalam lingkungannya.

2.1.2 Indikator Peran

Teori peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang terdiri dari beberapa komponen yang dikemukakan oleh Ilyas Yusuf (2014:47) peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yaitu:

a. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator, adalah menyediakan sarana, prasarana, dan kondisi yang mendukung bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, Yusuf (2014:47). Dalam hal ini, BPODT menjalankan fungsi fasilitator dengan menyediakan fasilitas listrik dan air secara gratis bagi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape*. Dukungan infrastruktur dasar ini membantu masyarakat mengurangi beban biaya operasional sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang layak dan efisien. Selain itu, BPODT juga memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menikmati hasil usahanya sendiri, tanpa adanya sistem bagi hasil atau pungutan. Kebijakan ini menunjukkan bentuk fasilitasi ekonomi yang mendorong kemandirian pelaku UMKM.

b. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menetapkan aturan, kebijakan, dan pedoman yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Yusuf (2014:48). Dalam konteks ini, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menjalankan peran sebagai regulator dengan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata *The Kaldera*

Toba Nomadic Escape yang berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut ialah penyediaan tempat usaha secara gratis tanpa sistem sewa kepada masyarakat lokal. Kebijakan ini merupakan upaya BPODT untuk memberi ruang ekonomi kepada masyarakat agar dapat berusaha di kawasan wisata tanpa beban biaya awal. Tindakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang BPODT, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk mengatur dan mengelola kawasan otorita secara mandiri, termasuk dalam penetapan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

c. Dinamisor

Menurut Yusuf (2014:49) sebagai dinamisor, pemerintah berperan untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, BPODT berperan sebagai penggerak masyarakat melalui kegiatan pelatihan tata boga bagi pelaku UMKM dan warga sekitar Desa Pardamean Sibisa. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah produk kuliner lokal yang bernilai jual tinggi, sekaligus memperkenalkan standar kebersihan dan estetika penyajian bagi pelaku usaha wisata kuliner. Melalui kegiatan ini, BPODT tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

Teori peran pemerintah sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena BPODT merupakan lembaga otorita yang memiliki kedudukan dan kewenangan quasi-pemerintahan sesuai dengan Perpres No. 49 Tahun 2016. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi otoritatif dan koordinatif dalam

pengembangan kawasan Danau Toba, BPODT memiliki tanggung jawab yang serupa dengan peran-peran yang dirumuskan dalam teori peran pemerintah, sehingga teori ini tepat untuk menganalisis bagaimana BPODT menjalankan kewenangannya dalam konteks pemberdayaan UMKM. Selain itu, teori peran pemerintah memberikan indikator yang jelas dan terukur yaitu fasilitator, regulator, dan dinamisor yang dapat langsung dioperasionalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran BPODT diwujudkan dalam mendukung UMKM di kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape*. Ketiga indikator tersebut sejalan dengan kebutuhan penelitian karena pemberdayaan UMKM pada dasarnya berhubungan dengan penyediaan dukungan dan fasilitas, penetapan kebijakan yang kondusif, serta dorongan inovasi dan penguatan kapasitas, yang semuanya merupakan bagian dari indikator peran pemerintah menurut Ilyas Yusuf.

2.2 Pemberdayaan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut.

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Priyono dan Pranarka (1996:34), menjelaskan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat negara regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi, dan lain-lain.

Kartasasmita (1996:74), mengatakan bahwa ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Upaya ini harus terarah (*targeted*). Secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri, masyarakat sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanggulangannya dilakukan secara individu.

Bertitik tolak dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi UMKM serta berusaha untuk mengembangkannya. Partisipasi aktif pelaku UMKM harus dibangkitkan supaya mereka menjadi pelaku utama dari suatu program pemberdayaan (menciptakan kemandirian pada pelaku UMKM).

2.2.2 Tahapan Pemberdayaan

Agar upaya pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemberdayaan perlu mempergunakan tiga tahapan, yaitu penyiapan (bagi yang hendak diperdayakan), pemihakan (terhadap yang diperdayakan), dan perlindungan (bagi yang sudah mandiri). Kartasasmita (1996:74) menambahkan upaya pemberdayaan dapat melalui tiga arah, antara lain:

1. Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah usaha untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses

rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Ketiga arah pemberdayaan di atas berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan
2. Untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan.

(Sumodiningrat, 1996:40)

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, pembangunan prasarana dasar. Hal ini terkait pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat.

Untuk sampai pada ketiga sasaran di atas maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui salah tiga tahapan (Priyono dan Pranarka, 1996:2), yaitu:

1. Inisial, yaitu pemberdayaan dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat.
2. Partisipatoris, pemberdayaan dari pemerintah bersama masyarakat, dan untuk rakyat.
3. Emansipatoris, pemberdayaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah.

Pada tahap ketiga ini, masyarakat sudah dapat menemukan eksistensi dirinya, sehingga dapat melakukan pembaruan-pembaruan dalam mengaktualisasikan diri atau emansipatoris.

2.2.3 Indikator Pemberdayaan

Dalam buku Edi Suharto (2009:57) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Pemberdayaan dianggap sebagai proses perkembangan yang berasal dari pertumbuhan individu dan kemudian transisi ke transformasi sosial yang lebih luas.
2. Pemberdayaan memerlukan keadaan psikologis yang ditandai dengan rasa percaya diri yang mendalam, utilitas, dan kemampuan untuk melakukan kontrol atas diri sendiri dan orang lain.
3. Pemberdayaan memerlukan keadaan psikologis yang ditandai dengan rasa percaya diri yang mendalam, utilitas, dan kemampuan untuk melakukan kontrol atas diri sendiri dan orang lain.

Nugroho (2008:98) mengemukakan beberapa indikator pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. Akses mengacu pada konsep hak universal untuk memanfaatkan atau mengakses sumber daya produktif yang ada di lingkungan tertentu.
2. Partisipasi menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses pembuatan dan pemanfaatan aset sumber daya.
3. Kontrol menandakan adanya peluang bagi pria dan wanita untuk memberikan pengaruh dan otoritas atas pemanfaatan sumber daya.
4. Manfaat, di sisi lain, memerlukan prinsip kenikmatan yang adil dari pemanfaatan sumber daya dan pengembangan bersama oleh pria dan wanita.

2.2.4 Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2013:122) mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*), Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan institusi, seperti pembentukan jaringan kemitraan bisnis.
2. Perbaikan Usaha (*Better Bussines*), Secara khusus, peningkatan dalam pendidikan, aksesibilitas, dan institusi diantisipasi untuk meningkatkan operasi bisnis.
3. Pendapatan (*Better Income*), Ketika operasi bisnis meningkat, akan ada peningkatan dalam pendapatan yang dihasilkan, yang mencakup pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*), Peningkatan pendapatan diproyeksikan untuk memperbaiki lingkungan (baik fisik maupun sosial), karena degradasi lingkungan sering dikaitkan dengan kemiskinan atau pendapatan terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*), Ketika tingkat pendapatan dan kondisi lingkungan menguntungkan, ada harapan untuk meningkatkan standar hidup masing-masing keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (*Better Community*), Kualitas hidup yang unggul, didukung oleh lingkungan yang kondusif, kemungkinan akan menghasilkan peningkatan keseluruhan dalam mata pencaharian masyarakat.

2.2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Salah satu kebijakan mengenai UMKM yang baru disahkan yakni Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Optimalisasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah.

2.2.6 Peran UMKM di Indonesia

Latar belakang sejarah ekonomi telah ditinjau kembali untuk menilai kembali keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). pertama ekonomi yang luar biasa di Jepang telah dikaitkan dengan skala sektor usaha kecil. Sebaliknya, dampak UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II dianggap tidak signifikan. Negara-negara berkembang mulai mengalihkan fokus mereka untuk menganalisis peran dan dampak UMKM terhadap kemajuan ekonomi dengan mengamati pengalaman negara-negara berkembang lainnya. UMKM adalah pemain penting dalam mendorong kemajuan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan amanat konstitusi UUD 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan ekonomi berbasis demokrasi. UMKM memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka pengangguran. Dalam konteks pembangunan nasional, UMKM menjadi pelaku utama perekonomian karena kemampuannya yang dominan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, perikanan, dan industri rumah tangga. Walaupun demikian, UMKM masih menghadapi banyak keterbatasan, terutama dari sisi permodalan, sumber daya manusia, dan akses terhadap pasar maupun teknologi.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2013 sektor ini mampu menyumbang lebih dari 70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 114 juta tenaga kerja pada tahun 2014. Usaha mikro menjadi kontributor terbesar baik dalam PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada masa krisis tahun 1998, di mana UMKM tetap bertahan saat banyak usaha besar mengalami kemunduran.

Meskipun memiliki peran strategis, UMKM di Indonesia menghadapi sejumlah kendala baik internal maupun eksternal. Secara internal, permasalahan meliputi keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya jaringan usaha. Sedangkan secara eksternal, hambatan muncul dari kurangnya sarana dan prasarana, persaingan usaha yang tidak sehat, dampak otonomi daerah, serta tekanan dari perdagangan bebas global. Untuk mengatasi hal

tersebut, pemerintah bersama lembaga keuangan memiliki peran penting melalui kebijakan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) guna memperkuat struktur permodalan dan daya saing UMKM.

2.3 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT)

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum BPODT

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaksana pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pembentukan BPODT didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang disahkan pada tanggal 1 Juni 2016. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pariwisata.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016, BPODT adalah “badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan kawasan otorita Danau Toba dan mendukung koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan Danau Toba.” Dengan demikian, BPODT memiliki kedudukan strategis dalam mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai kawasan destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah administratif.

Secara kelembagaan, BPODT merupakan bentuk inovasi kelembagaan pemerintah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Fungsi otoritatif, yakni kewenangan pengelolaan langsung terhadap kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Otorita Danau Toba.
- 2) Fungsi koordinatif, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan pariwisata di wilayah Danau Toba yang berada di tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Simalungun.

Dasar hukum pembentukan BPODT juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BPODT dibentuk sebagai lembaga khusus yang memiliki mandat untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata Danau Toba yang berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Peneliti Terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
1.	Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20	Peneliti terdahulu berfokus pada pemerintah daerah di bidang ekonomi umum,	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama meneliti peran lembaga pemerintah

No.	Nama dan judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Peneliti Terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
	Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara (Skripsi, Arka Damayanti, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)	penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentas	Tahun 2008. Upaya yang dilakukan meliputi pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal dan peralatan, pendampingan usaha, serta kemudahan perizinan dan promosi produk. Faktor pendukung pemberdayaan UMKM antara lain adanya bantuan modal, sumber daya manusia dan alam yang memadai, serta dukungan kebijakan pemerintah. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, dampak pandemi Covid-19, dan sulitnya akses ke wilayah terpencil. Secara umum, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sudah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.	Peneliti terdahulu menyoroti pelatihan dan bantuan modal secara lokal. Sedangkan peneliti sekarang meneliti lembaga otorita pariwisata nasional dalam konteks pengembangan UMKM pariwisata dan menitik beratkan pada strategi BPODT dalam mengintegrasikan pemberdayaan UMKM dengan program pembangunan pariwisata berkelanjutan (SDGs)	dalam pemberdayaan UMKM dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
2.	Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berperan aktif dalam pemberdayaan industri kerajinan marmer di	Peneliti terdahulu fokus pada sektor industri kerajinan tradisional	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama mengkaji bentuk

No.	Nama dan judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Peneliti Terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
	(UKM) PADA Industri Kerajinan Marmer (Skripsi, Berlina Puspa Dewi, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi Publik)	kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan penarikan kesimpulan.	Desa Gamping. Upaya yang dilakukan meliputi penyediaan modal usaha melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, fasilitasi teknologi, serta pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para pengrajin. Pemerintah juga membantu memasarkan produk dengan mengikutsertakan pengrajin dalam berbagai pameran. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga teknis, dan belum rutinnya pelatihan. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam pemberdayaan UKM industri marmer dinilai sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengembangan SDM dan inovasi produk.	dan peneliti terdahulu menyoroti peran pemerintah daerah, sedangkan peneliti sekarang fokus pada UMKM wisata di kawasan prioritas nasional dan menyoroti lembaga otorita pariwisata pusat dengan mandat khusus dibawah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016.	dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.
3.	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembang	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tekni Pengumpulan data dengan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam pengembangan UMKM kerajinan kulit telah berjalan efektif, terutama sebagai fasilitator melalui	Peneliti Terdahulu mengkaji partisipasi pelaku UMKM secara teoritis dan peneliti terdahulu	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menyoroti sinergi antara pemerintah dan masyarakat

No.	Nama dan judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Peneliti Terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
	an Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan. (Skripsi, Hamami Cahya Prastika, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.)	mendalam (semi struktural), observasi, dan dokumentasi.	penyediaan mesin jahit, pelatihan desain, dan pendampingan digital e-IKM; sebagai regulator via Peraturan Bupati No. 70/2008 dan No. 73/2016 yang menjadi landasan hukum; serta sebagai katalisator melalui kerjasama permodalan dengan BUMN seperti INKA dan Telkom, serta promosi pameran, dengan tipologi utama fasilitator yang mendukung produksi, pemasaran, SDM, dan desain/teknologi sesuai UU No. 20/2008, menghasilkan peningkatan kualitas produksi hingga menjadi produk unggulan (Rp 76,46 miliar pada 2014) meskipun terkendala penurunan SDM dan skill rendah. Partisipasi pelaku UMKM juga berjalan baik dalam perencanaan (musrenbang dan diskusi kebutuhan), pelaksanaan (mengikuti pelatihan, memanfaatkan mesin, dan pameran), serta pemanfaatan hasil (peningkatan skill, efisiensi produksi, dan pelanggan baru), dengan tipologi utama	fokus pada kerajinan kulit sedangkan peneliti sekarang tidak menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, melainkan pada strategi kelembagaan BPODT dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM wisata dan berfokus pada penguatan ekonomi kreatif pariwisata.	dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

No.	Nama dan judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Peneliti Terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
			pemanfaatan hasil menurut Cohen & Uphoff, tetapi tidak ada partisipasi dalam evaluasi karena pelaku UMKM hanya sebagai target sasaran dan evaluasi dilakukan internal pemerintah. Secara keseluruhan, pengembangan UMKM kerajinan kulit berhasil meningkatkan kontribusi ekonomi (76% terhadap UMKM daerah), namun menghadapi kendala utama pada SDM, sehingga disarankan pembentukan BLK untuk pelatihan berkelanjutan dan inovasi program tahunan.		
4.	Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Pengerajin Purun Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat (Tesis, Suyono, Universitas Medan Area)	Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap	Peran pemerintah desa sebagai katalisator sangat penting dalam mendorong kolaborasi, inovasi, dan pengembangan jaringan antar-pengrajin. Pemerintah desa berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha pengrajin purun. Pemberdayaan ini meningkatkan kualitas dan nilai jual produk purun, memperluas akses pasar, serta berkontribusi pada	Peneliti terdahulu berfokus pada pemerintahan desa dengan skala lokal dan produk tradisional (kerajinan purun) dan menekankan aspek kemandirian desa sedangkan peneliti sekarang	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki kesamaan dalam membahas pemberdayaan ekonomi lokal melalui peran lembaga pemerintahan .

No.	Nama dan judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Peneliti Terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
		kegiatan pemerintah desa dan pengrajin.	peningkatan kesejahteraan pengrajin dan ekonomi lokal.	meneliti lembaga nasional BPODT dengan fokus pada pengembangan UMKM pariwisata di kawasan strategis Danau Toba dan menyoroti intervensi pemerintah pusat dalam pemberdayaan berbasis pariwisata.	
5.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare. (Skripsi, Sitti Hadjerah)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM dan pihak terkait,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Kelurahan Watang Soreang dilakukan melalui pemberdayaan yang terstruktur dan kolaboratif. Pemerintah berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan bantuan modal, sementara masyarakat menunjukkan partisipasi tinggi dalam kegiatan ekonomi lokal. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan modal dan SDM, potensi ekonomi daerah ini terus meningkat seiring dengan dukungan pemerintah dan	Peneliti terdahulu tidak meneliti lembaga pemerintah tertentu dan menyoroti proses sosial dan partisipasi masyarakat secara umum sedangkan peneliti sekarang berfokus pada BPODT sebagai lembaga pemerintah	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama meneliti peran lembaga pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

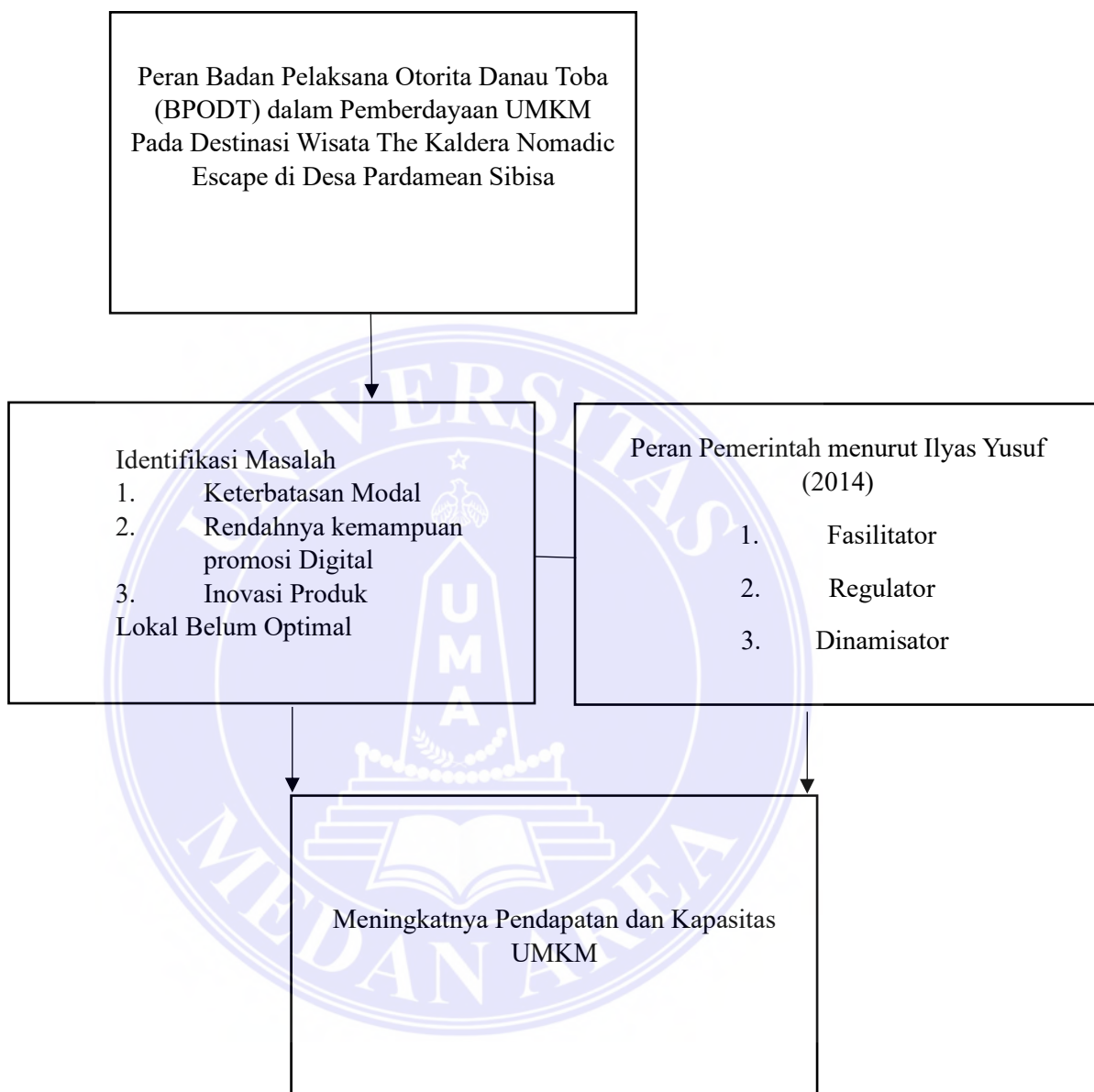
No.	Nama dan judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Peneliti Terdahulu dan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang
		serta dokumentasi terhadap arsip, laporan kegiatan, dan data statistik kelurahan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya.	kemajuan infrastruktur kawasan Cempae.	pusat dengan mandat khusus dan menyoroti implementasi kebijakan pemberdayaan pariwisata untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*research pramework*), adalah seperti cetak biru atau panduan yang esensial untuk sebuah penelitian yang berperan sebagai panduan komprehensif yang mencerminkan teori yang relevan untuk hipotesis penelitian, serta memberikan kerangka kerja yang merinci pertimbangan filosofis, epistemologis, metodologis, dan analitis bagi peneliti. Dengan mengacu pada kerangka berpikir, peneliti dapat memanfaatkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk penelitian mereka, yang membantu memaksimalkan hasil penelitian mereka (Wardhana et al, 2015;38 Grant dan Osanloo, 2014;14 Van Ryn & Heaney, 1992:55). Kerangka berfikir dibawah akan di terapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Peran Badan

Pelaksana Otorita Danau Toba dalam Pemberdayaan UMKM pada Destinasi Wisata

The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa”.



Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana peran BPODT dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di sekitar destinasi wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses, dinamika, serta interaksi sosial yang terjadi antara BPODT dan masyarakat pelaku UMKM.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berusaha menguraikan secara rinci bagaimana peran BPODT baik sebagai fasilitator, regulator, maupun dinamisator dalam upaya pemberdayaan UMKM di kawasan wisata tersebut.

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih secara *purposive* karena Desa Pardamean Sibisa merupakan wilayah yang memiliki destinasi wisata unggulan yaitu *The Kaldera Toba Nomadic Escape*, yang menjadi bagian dari *Toba Caldera UNESCO Global Geopark*.

Kawasan ini menjadi contoh nyata pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang memunculkan berbagai aktivitas ekonomi lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Pardamean Sibisa menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang berkembang seiring dengan kehadiran *The Kaldera Toba Nomadic Escape*. Keberadaan BPODT sebagai lembaga otoritatif di kawasan ini memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa bentuk dukungan yang telah dilakukan antara lain pelatihan tata boga bagi masyarakat, penyediaan fasilitas listrik dan air secara gratis, serta penyediaan tempat usaha tanpa sistem sewa bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata.

Lokasi penelitian ini juga menunjukkan dinamika yang menarik antara potensi ekonomi lokal dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Beberapa kendala yang masih ditemukan meliputi keterbatasan modal, rendahnya kemampuan promosi digital, serta belum optimalnya inovasi produk lokal yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana BPODT menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator dalam proses pemberdayaan UMKM di kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape*, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.

3.2.2 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Uraian	2025				2026						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Proposal											
2	Seminar Proposal											
3	Pengajuan Surat Penelitian											
4	Penelitian											
5	Seminar Hasil											
6	Perbaikan Seminar Hasil											
7	Bimbingan Skripsi											
8	Pendaftaran Sidang Skripsi											
9	Sidang Skripsi											

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi penting terkait fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih karena memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dalam kegiatan yang menjadi fokus penelitian. Menurut Moleong (2017:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Sugiyono (2017:218), informan merupakan sumber data dalam penelitian kualitatif yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan informan harus mempertimbangkan relevansi, pengalaman, dan kelengkapan informasi yang dapat mereka berikan. Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan paling luas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Spradley (2007:36), informan kunci berperan sebagai sumber utama dalam memahami struktur umum, kebijakan, dan proses yang terjadi dalam suatu organisasi atau komunitas. Informan jenis ini biasanya berasal dari pimpinan atau pihak yang memiliki otoritas.

b. Informan Utama

Informan utama adalah individu yang terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diteliti dan memiliki pengalaman praktis terhadap fenomena penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2018:90), informan utama merupakan pelaku langsung yang memberikan data utama berupa pengalaman, persepsi, dan praktik di lapangan.

c. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu yang memberikan informasi pendukung guna memperkaya data utama serta berfungsi sebagai pembanding atau penguat data. Menurut Sugiyono (2017:219), informan tambahan berperan dalam memberikan data pelengkap melalui sudut pandang yang berbeda, sehingga meningkatkan keabsahan data melalui triangulasi sumber.

Melalui kombinasi ketiga kelompok informan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran BPODT dalam mendukung pemberdayaan UMKM di kawasan wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape*.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Informan	Keterangan
1	Bapak Frengki Simbolon	Informan Kunci	Koordinator Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata
2	a. Arga Manurung b. Ibu Pipit Setyanti c. Ibu Mida Manurung d. Bapak Mangalam Samosir	Informan Utama	Pelaku UMKM yang beroperasi di Kawasan Wisata <i>The Kaldera Toba Nomadic Escape</i>
3	a. Maria Sirait b. Bapak Mangatas Butar-butar c. Sintia Hutajulu d. Junianto Rajagukguk	Informan Tambahan	Wisatawan domestik dan masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian ini, diperlukan data yang relevan. Melalui data, peneliti dapat mampu mengetahui secara langsung fenomena sosial yang terjadi di lapangan yang kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut John W. Creswell langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dokumentasi dan lain-lain (Creswell, 2013:266). Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas

individu-individu di lokasi penelitian. Pada pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti (Creswell, 2013:266). Oleh sebab itu, peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang relevan sehingga dapat menguatkan dan mendukung hasil wawancara. Alasan peneliti menggunakan observasi dalam penelitian ini yaitu karena observasi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan fenomena yang sedang diamati. Selain itu teknik ini memudahkan peneliti dalam mengamati bagaimana peran dari BPODT dalam pemberdayaan UMKM pada Destinasi Wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape*.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011:186). Teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara secara mendalam yang dilakukan secara sistematis kepada pihak yang mengerti dan paham tentang fenomena dan kondisi di lapangan serta memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti sehingga dapat memperkuat data yang dimiliki oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden yaitu:

1. Koordinator Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata BPODT untuk tujuan memperoleh informasi

mengenai peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM pada Destinasi Wisata *The Kaldera Nomadic Escape* serta faktor-faktor penghambat dalam proses pemberdayaan UMKM.

2. Pelaku UMKM yang beroperasi di Kawasan Wisata *The Kaldera Nomadic Escape*

Penulis melakukan wawancara dengan Pelaku UMKM Di Desa Pardamean Sibisa untuk mengetahui informasi yang mendalam mengenai bagaimana peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM pada Destinasi Wisata *The Kaldera Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa. Penulis juga bertanya apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM pada kawasan wisata ini.

3. Wisatawan Domestik dan Masyarakat

Wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat UMKM khususnya industri batu bata terkait bagaimana peran dari pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada Destinasi Wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa. Penulis akan mengumpulkan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Penulis juga akan mempertanyakan faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM pada Destinasi Wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengarsipan bukti kegiatan akademik yang dilakukan dalam bentuk foto, video, daftar hadir, notulen, dan dokumen resmi lainnya. Menurut Sugiyono (2017:329), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara

mempelajari catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Sementara itu, Lexy J. Moleong (2018:216) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan sumber data tertulis yang dapat digunakan sebagai data pendukung yang sah dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, dokumentasi dalam seminar proposal memiliki peranan penting sebagai bukti administratif dan akademik atas pelaksanaan kegiatan ilmiah mahasiswa.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, seperti arsip BPODT, laporan kegiatan, peraturan BPODT, foto kegiatan, maupun data statistik dari instansi terkait yang terkait dengan pemberdayaan UMKM pada Destinasi *Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape* di Desa Pardamean Sibisa.

Melalui kombinasi ketiga kelompok informan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran BPODT dalam mendukung pemberdayaan UMKM di kawasan wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape*.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengolah, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan temuan yang bermakna dan menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama pengumpulan data, dan setelah data terkumpul secara keseluruhan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1992:16-24) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian akan dikategorikan berdasarkan peran pemerintah BPODT sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan antar variabel, serta dinamika yang terjadi dalam proses pemberdayaan UMKM oleh BPODT.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui data tambahan untuk memastikan keabsahannya. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data lebih akurat dan terpercaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM di Destinasi Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape telah dijalankan melalui fungsi fasilitator, regulator, dan dinamisator, namun capaian pemberdayaan masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya berorientasi pada kemandirian UMKM. Pembahasan menunjukkan bahwa BPODT telah berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dasar usaha, menetapkan regulasi operasional kawasan, serta menggerakkan partisipasi UMKM melalui pelatihan dan event pariwisata. Peran tersebut sejalan dengan teori peran Ilyas Yusuf yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator dalam pembangunan. Namun, implementasinya masih cenderung bersifat parsial, belum merata, dan lebih menonjol pada aspek penyediaan fasilitas fisik serta pengendalian kawasan. Jika ditinjau melalui perspektif pemberdayaan Kartasasmita, peran BPODT baru sampai pada tahap enabling dan motivating, sementara aspek empowering dan protecting yang bertujuan membangun kapasitas, keadilan akses, dan kemandirian UMKM belum sepenuhnya terwujud secara berkelanjutan.
2. Berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan sosial menjadi faktor pembatas optimalisasi peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM, sehingga berdampak pada keberlanjutan dan pemerataan hasil

pemberdayaan. Hambatan yang dihadapi BPODT mencakup keterbatasan kewenangan operasional, kompleksitas koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi dengan pemerintah daerah, serta rendahnya literasi pariwisata dan kesiapan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan peran fasilitator, regulator, dan dinamisor belum sepenuhnya inklusif dan berkesinambungan. Ketergantungan pada program pemerintah pusat dan event tertentu menunjukkan bahwa dinamika UMKM belum sepenuhnya digerakkan oleh mekanisme pasar dan kapasitas internal pelaku usaha. Dengan demikian, pembahasan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program dan regulasi, tetapi oleh kemampuan lembaga pengelola kawasan dalam membangun sistem pendampingan jangka panjang, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas UMKM secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Peran fasilitator perlu diperluas dari sekadar penyediaan sarana dan prasarana dasar menuju standarisasi fasilitas dan penguatan sistem pendampingan UMKM agar pelaku usaha tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan pemerintah. Pelaksanaan fungsi regulator perlu disertai dengan komunikasi kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif, baik kepada pelaku UMKM maupun wisatawan, agar regulasi tidak hanya ditaati secara

administratif, tetapi juga dipahami dan diterima secara sosial. Peran dinamisator perlu diarahkan pada pembinaan jangka panjang yang berkelanjutan, bukan hanya berbasis pelatihan dan event sesaat, dengan memperkuat mentoring usaha, inkubasi UMKM, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai pariwisata. Perlu dilakukan pemerataan sasaran program pemberdayaan antara UMKM di dalam dan di luar kawasan otorita guna menghindari kesenjangan akses dan persepsi ketidakadilan di tingkat masyarakat lokal.

2. Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan kapasitas usaha secara mandiri, terutama dalam aspek inovasi produk, pelayanan, dan manajemen usaha, agar mampu memanfaatkan peluang pariwisata secara optimal dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif dalam program pelatihan, pendampingan, dan jejaring usaha perlu terus ditingkatkan agar UMKM tidak hanya bergantung pada momentum event, tetapi mampu membangun daya saing jangka panjang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek pemberdayaan UMKM dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang berbeda, seperti analisis kebijakan, kolaborasi multi-stakeholder, atau dampak ekonomi jangka panjang pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi penelitian ke destinasi wisata lain di kawasan Danau Toba untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran BPODT dalam pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication.
- Grant, C., & Osanloo, A. (2014). *Understanding, Selecting, and Integrating a Theoretical Framework in Dissertation Research*. Journal of Administrative Issues.
- Ilyas Yusuf. (2014). *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Ryn, M., & Heaney, C. (1992). *Developing Effective Theoretical Frameworks for Social Research*. Journal of Social Research Methods.

Wardhana, A., dkk. (2015). *Kerangka Berpikir dalam Penelitian Sosial*. Jurnal Ilmu Sosial.

Yoeti, O. A. (2008). *Pariwisata: Dinamika, Pengembangan, dan Pengelolaan*. Jakarta

Jurnal/Skripsi/Tesis

Aisyah Putri, M. (n.d.). *PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA INDUSTRI BATU BATA (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)*.

Berlina, P. D. (2010). *Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Industri Kerajinan Marmer di Kabupaten Tulungagung*. Universitas Brawijaya.

Damayanti, A. (2021). *Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Hamami, C. P. (2017). *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Universitas Negeri Surabaya.

Sitti, H. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare*. Universitas Muhammadiyah Parepare.

Suyono. (2025). *Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Pengrajin Purun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat*. Universitas Medan Area.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Website

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. (2023). *Profil dan Program BPODT*. Diakses pada <https://www.bpodt.id>, 20 Oktober 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba. (2023). *Kabupaten Toba Dalam Angka 2023*. Diakses pada <https://tobakab.bps.go.id/publication>, 18 Oktober 2023.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Danau Toba*. Diakses pada <https://kemenparekraf.go.id>, 19 Oktober 2023.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Program Pemberdayaan UMKM*. Diakses pada <https://www.kemenkopukm.go.id>, 20 Oktober 2023.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. Diakses pada <https://www.bps.go.id>, 19 Oktober 2023.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2023). *Sustainable Tourism Development*. Diakses pada <https://www.unwto.org>, 20 Oktober 2023.

United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Diakses pada <https://sdgs.un.org>, 21 Oktober 2023.

Neliti. (2023). *Indonesian Research Repository*. Diakses pada <https://www.neliti.com>, 20 Oktober 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Informan Kunci

Peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Destinasi Wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* Di Desa Pardamean Sibisa

a. Peran Sebagai Fasilitator

1. Bagaimana BPODT menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM di kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape*?
2. Fasilitas apa saja yang secara nyata sudah diberikan kepada pelaku UMKM dan bagaimana mekanisme pemberiannya?
3. Bagaimana BPODT memfasilitasi akses pelaku UMKM terhadap pelatihan, permodalan, dan pemasaran produk?

b. Peran Sebagai Regulator

1. Kebijakan apa saja yang ditetapkan BPODT untuk mengatur keberadaan dan aktivitas UMKM di kawasan wisata ini?
2. Bagaimana prosedur perizinan dan pengaturan penggunaan kios atau lapak UMKM di bawah kewenangan BPODT?
3. Bagaimana BPODT memastikan aturan yang dibuat berpihak pada pengembangan UMKM lokal?

c. Peran Sebagai Dinamisator

1. Bagaimana BPODT mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan UMKM di kawasan wisata?
2. Program apa saja yang dilakukan BPODT untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan inovasi pelaku UMKM?
3. Bagaimana bentuk pendampingan atau pembinaan yang dilakukan agar UMKM terus berkembang secara berkelanjutan?



Lampiran 2. Wawancara Informan Utama

Peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Destinasi Wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* Di Desa Pardamean Sibisa

a. Peran Sebagai Fasilitator

1. Fasilitas apa saja yang diberikan BPODT untuk mendukung usaha Pelaku UMKM di kawasan wisata ini?
2. Seberapa membantu fasilitas tersebut dalam menjalankan usaha sehari-hari?
3. Adakah bentuk program yang dibuat oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk pemberdayaan umkm pada Destinasi *The Kaldera Toba Nomadic Escape*?

b. Peran Sebagai Regulator

1. Bagaimana aturan yang ditetapkan BPODT terkait penggunaan tempat usaha dan aktivitas UMKM?
2. Apakah prosedur perizinan atau penempatan kios mudah dipahami dan dijalankan?
3. Apakah aturan BPODT sudah mendukung kenyamanan dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM?

c. Peran Sebagai Dinamisator

1. Apakah BPODT pernah mendorong atau mengajak pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pelatihan atau kegiatan tertentu?
2. Bagaimana peran BPODT dalam memotivasi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk atau pelayanan?
3. Apakah ada perubahan semangat, keterampilan, atau cara berusaha setelah adanya program dari BPODT?



Lampiran 3. Wawancara Informan Tambahan

Peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Destinasi Wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape* Di Desa Pardamean Sibisa

a. Peran Sebagai Fasilitator

1. Bagaimana penilaian masyarakat dan wisatawan terhadap ketersediaan fasilitas UMKM yang disediakan di kawasan wisata *The Kaldera Toba Nomadic Escape*?
2. Menurut masyarakat dan wisatawan, sejauh mana fasilitas UMKM tersebut mendukung kenyamanan pengunjung dan aktivitas ekonomi pelaku UMKM?
3. Bagaimana pandangan masyarakat dan wisatawan terhadap peran BPODT dalam menciptakan lingkungan usaha UMKM yang layak dan mendukung kegiatan wisata?

b. Peran Sebagai Regulator

1. Apakah masyarakat dan wisatawan melihat adanya aturan atau kebijakan yang jelas dalam pengelolaan dan penataan kios UMKM di kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape*?
2. Bagaimana persepsi masyarakat dan wisatawan terhadap keteraturan dan kerapian penataan UMKM sebagai hasil dari pengaturan oleh BPODT?

3. Menurut masyarakat dan wisatawan, apakah aturan yang diterapkan BPODT sudah mendukung kenyamanan kawasan wisata dan keberlangsungan UMKM lokal?

c. Peran Sebagai Dinamisator

1. Apakah masyarakat dan wisatawan mengetahui atau melihat adanya kegiatan pelatihan, *event*, atau promosi yang melibatkan pelaku UMKM di kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape*?
2. Bagaimana penilaian masyarakat dan wisatawan terhadap keaktifan pelaku UMKM dalam menawarkan produk kepada pengunjung?
3. Menurut masyarakat dan wisatawan, apakah pelaku UMKM di kawasan *The Kaldera Toba Nomadic Escape* menunjukkan inovasi dalam produk maupun pelayanan sebagai dampak dari peran BPODT?

Lampiran 4. Surat Keterangan Riset dari Fakultas



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3960/FIS.0/01.10/XII/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 23 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis BPODT
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Indah Sucita Sirait
NIM : 228520037
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor (BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA) BPODT untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

" Peran Bpodt Dalam Pemberdayaan Umkm Pada Destinasi Wisata The Kaldera Nomadic Escape Di Desa Pardamean Sibisa"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran 5. Surat Telah Selesai Riset dari Instansi



KEMENTERIAN PARIWISATA
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Kantor Toba: Toba Caldera Resort, Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata,
Kabupaten Toba, Sumatera Utara 22386
Kantor Medan: Jl. Kapten Pattimura No.125, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Telp. 061-450-2908
Email: info@bpodt.id



Nomor : 05/SU.1/BPODT/II/2026 Toba, 07 Januari 2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frengki Simbolon
Nip : 199307052025211110
Jabatan : Koordinator Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata
Instansi : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Indah Sucita Sirait
NIM : 228520037
Program Studi : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area (UMA)

Telah melaksanakan kegiatan riset/penelitian di Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Peran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam Pemberdayaan UMKM Pada Destinasi Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa"

Demikian surat keterangan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator
Divisi Pengembangan Bisnis
Pariwisata,

Frengki Simbolon, S.Tr.Par
Nip. 199307052025211110

Tembusan :

1. Kadiv Pengembangan Bisnis;
2. Arsip.

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. UMKM Kuliner Kawasan Wiasata The Kaldera Toba Nomadic Escape



Gambar 2. UMKM Souvenir di Kawasan Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape



Gambar 3. Informan Kunci
Bapak Frengki Simbolon selaku Koordinator Divisi Pengembangan
Bisnis Pariwisata



Gambar 4. Informan Utama
Ibu Mida Manurung selaku Pelaku UMKM Kuliner di Kawasan Wisata
The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa



Gambar 5. Informan Utama
Ibu Pipit Setyanti selaku Pelaku UMKM Kuliner di Kawasan The
Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa



Gambar 6. Informan Utama
Bapak Mangalam Samosir selaku Pelaku UMKM Souvenir di Kawasan
Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa



Gambar 7. Informan Utama
Dea selaku Pelaku UMKM Souvenir di Kawasan Wisata The
Kaldera Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa



Gambar 8. Informan Tambahan
Bapak Mangatas Butar- Butar selaku Masyarakat di Sekitar Kawasan
Destinasi Pariwisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean
Sibisa



Gambar 9. Informan Tambahan
Maria Sirait selaku Masyarakat di Sekitaran Destinasi Wisata The Kaldera
Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa



Gambar 10. Informan Tambahan
Junanto Rajagukguk selaku Wisatawan Domestik yang berkunjung ke
Destinasi Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean
Sibisa



Gambar 11. Informan Tambahan
Sintia Hutajulu selaku Wisatawan Domestik yang berkunjung ke
Destinasi Wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean
Sibisa

Lampiran 7. Dokumentasi Pelatihan UMKM



Gambar 1. Branding UMKM Binaan BPODT



Gambar 2. Pelatihan Digital *Marketing & Ecommerce*



Gambar 3. Pelatihan Peningkatan Produktivitas DIPA Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan